

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perilaku masyarakat yang dinamis seiring dengan perkembangan waktu dalam berbagai aktivitasnya mempunyai dampak sosial terhadap interaksi sosial antar anggota masyarakat. Aktivitas sosial di antara anggota masyarakat ini menimbulkan dampak terjadinya hubungan hukum diantara anggota masyarakat. Hukum mempunyai peran yang besar terhadap hubungan-hubungan sosial yang terjadi di antara anggota masyarakat.

Dalam perkembangannya hukum harus selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya perkembangan hukum cenderung tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Salah satu contoh bentuk ketertinggalan hukum dalam masyarakat adalah tentang pengaturan hukum tentang yayasan. Perlu diketahui dalam beberapa waktu pasca kemerdekaan sebelum munculnya peraturan hukum yang mengatur tentang yayasan di Indonesia, pendirian yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurispudensi Mahkamah Agung.

Yayasan pada dasarnya merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.<sup>1</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian pengertian tentang yayasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya yayasan lebih dikenal sebagai suatu organisasi sosial nirlaba atau tidak berorientasi pada keuntungan dalam aktivitasnya. Yayasan banyak dipilih oleh sebagian atau banyak orang yang mempunyai idealisme yang tinggi serta mempunyai tujuan sosial dan kemanusiaan.

Banyak kegiatan sosial yang dapat dilakukan melalui yayasan, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan panti-panti sosial. Wadah yayasan dipergunakan oleh para pendirinya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial untuk melakukan aktivitas bagi kepentingan umum. Dengan demikian keberadaan yayasan diharapkan dapat memberikan jaminan kepada aktivitas sosial masyarakat seperti halnya dengan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, harus selalu berupaya agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Yayasan secara historis merupakan wadah kegiatan sosial sudah ada sejak awal sejarah. Para Pharaoh, lebih dari 1000 SM, telah memisahkan

---

<sup>1</sup> Uwindz, 27 Mei 2010, Definisi Yayasan, Wikipedia; <http://uwindz.wordpress.com/2010/05/27/126/>, diakses 1 Januari 2010.

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Jo. UU Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

sebagian kekayaan untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan Yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato menjelang kematiannya pada tahun 347 SM, membagikan hasil pertanian dari tanah-tanah yang dimilikinya, untuk selamanya disumbangkan bagi akademi yang didirikannya. Ini mungkin yayasan pendidikan yang pertama tercatat dalam sejarah.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya banyak sekali ditemui yayasan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta di sekitar kita. Dalam perkembangannya pendirian yayasan harus mendapatkan legalitas secara hukum. Untuk itu dalam pendirian yayasan harus dituangkan dalam akta notaris tentang pendirian yayasan tersebut. Dalam hal ini mencakup aspek-aspek penting yang harus terdapat dalam yayasan tersebut. Dengan adanya legalitas terhadap pendirian yayasan akan dapat diketahui secara jelas bidang kegiatan yang ada dalam yayasan tersebut. Dengan demikian akan dapat diketahui secara jelas model dari yayasan yang bersangkutan.

Dalam pendirian yayasan, akta notaris pendiriannya didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 7 Armenwet 1854 (sudah tidak berlaku lagi) adanya keharusan untuk mendaftarkan kepada kota praja dalam jangka waktu yang berbeda-beda bagi yayasan yang sudah ada atau baru didirikan, dengan ancaman akan kehilangan wewenanganya untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian kedudukan badan

---

<sup>3</sup> Chatamarrasjid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 2

hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan. Dalam praktek hukum dan kebiasaan terbukti bahwa di Indonesia dapat didirikan yayasan dan yayasan yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

Yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subjek hukum yang lain dan berdasar yurisprudensi yayasan dianggap sebagai badan hukum. Setelah sekian lama yayasan hanya diatur oleh Kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan yayasan sebagai Badan Hukum. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan data yang tercatat pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 6 Agustus 2002, permohonan pengesahan pendirian yayasan dan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yayasan yang dilakukan oleh notaris atau pengurus yayasan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, volumenya cukup besar.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Standar Akta Yayasan dan Undang-Undang Yayasan*, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004.

Sebagai salah satu bentuk yayasan, yayasan pendidikan yang ada di negara Indonesia dalam pendiriannya juga menganut ketentuan yang tertuang sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang pendirian yayasan. Selama ini belum terdapat ketentuan atau dasar dalam model yayasan pendidikan sebagai acuan untuk membentuk suatu model yayasan pendidikan yang ideal. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengkaji dari berbagai tinjauan historis terhadap model yayasan pendidikan yang ada selama ini untuk dapat menentukan sebuah model yayasan pendidikan yang ideal yang adapat memberikan perlindungan bagi peserta didik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis bermaksud mengangkat permasalahan ini sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini diberikan judul: “MODEL YAYASAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DIDIK (Studi Kasus Pada Yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi di Surakarta)”.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian pembahasan masalah terbatas pada yayasan yang mengelola pendidikan tinggi di Surakarta. Sementara permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta dalam perspektif perlindungan peserta didik ?

2. Bagaimana model yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta yang direkomendasikan dalam perspektif perlindungan peserta didik ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta dalam perspektif perlindungan peserta didik.
- b. Untuk mengetahui model yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta yang dapat direkomendasikan dalam perspektif perlindungan peserta didik.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Memberikan gambaran tentang yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta dalam perspektif perlindungan peserta didik.
- b. Memberikan rekomendasi tentang model yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta dalam perspektif perlindungan peserta didik.
- c. Menciptakan yayasan pendidikan, khususnya perguruan tinggi di Surakarta yang mampu memberikan perlindungan terhadap peserta didiknya.

- d. Memberikan masukan kepada yayasan pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang ada di Surakarta yang mampu memberikan jaminan kepada peserta didik sehingga tercapai semua tujuan dari proses pembelajaran dan pelatihan peserta didik.

#### **D. Kerangka Teoritik**

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Menurut Rochmat Soemitro, yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.<sup>5</sup>

Menurut Budi Untung, berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut:<sup>6</sup> 1) Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain; 3) Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idiil yang lain; 4) Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan; 5) Yayasan tidak memenuhi

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, 15 Desember 1989, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta, hal. 9.

<sup>6</sup> Budi Untung, 2002, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Andi Yogyakarta, hal. 4.



anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan; 6) Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus; 6) Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang. sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat; 7) Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.<sup>7</sup>

Yayasan pendidikan pada dasarnya merupakan badan sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan peserta didik. Dimana keberadaan yayasan pendidikan juga harus diatur menurut aturan hukum yang berlaku sebagaimana dengan bentuk yayasan lainnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang mengkaji dan menganalisa tentang model yayasan pendidikan perguruan tinggi yang ada di Surakarta saat ini secara empiris untuk dicari kelebihan dan kekurangannya dan berupaya untuk mendapatkan model yayasan

---

<sup>7</sup> Budi Untung, , 2002, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Andi Yogyakarta, hal. 4.

pendidikan perguruan tinggi yang ideal dalam perspektif perlindungan hukum peserta didik.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan model yayasan pendidikan yang ada di Surakarta saat ini dan digunakan untuk memprediksi model yayasan pendidikan perguruan tinggi yang ideal dalam perspektif perlindungan hukum peserta didik.<sup>8</sup>

## 3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada model yayasan pendidikan perguruan tinggi yang ada di Surakarta. Hal ini dilakukan agar dalam pembahasan permasalahan pada penelitian ini dapat lebih terfokus dan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 4. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber data dalam penelitian ini diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data hasil observasi pada beberapa yayasan pendidikan yang ada di Surakarta terkait dengan model yayasan pendidikan dalam perspektif perlindungan hukum terhadap peserta didik yang diperoleh dari hasil wawancara baik dari pihak pengelola yayasan maupun pada peserta didik. Data Sekunder adalah

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.94.

sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui studi terhadap penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan maupun studi pada dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi secara langsung, wawancara dan studi kepustakaan atau *library research* guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan model analisis prediktif. Dimana model analisis prediktif ini digunakan untuk meramalkan/merencanakan model yayasan pendidikan yang ideal yang dapat digunakan untuk model yayasan pendidikan perguruan tinggi di masa yang akan datang dalam perspektif perlindungan hukum peserta didik dimana dasar peramalan/perencanaan model tersebut menggunakan dasar dan pertimbangan model-model yayasan pendidikan yang ada pada saat sekarang.

Adapun proses analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif interaktif yang dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 95.

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan rasional dan sistematis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini secara rinci sebagai berikut :

Pada bab I yang merupakan pendahuluan, secara rinci memaparkan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II memaparkan tentang tinjauan umum yayasan yang secara rinci memaparkan tentang pengertian dan kedudukan yayasan dalam hukum formal, pengertian dan kedudukan yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ yayasan, dan harta yayasan, dan tinjauan umum tentang badan hukum yang memaparkan secara rinci tentang pengertian badan hukum, syarat sebagai badan hukum, dan kemampuan dan perbuatan hukum badan hukum.

Pada bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang memaparkan secara rinci tentang deskripsi Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta, deskripsi Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta, dan deskripsi Yayasan Mitra Insani Klaten.

Pada bab IV yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan, secara rinci memaparkan tentang hasil penelitian yang berisi tentang yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta dalam perspektif perlindungan peserta didik dan model yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta yang direkomendasikan dalam perspektif peserta didik, sekaligus pembahasan tentang hasil penelitian.

Pada bab V yang merupakan penutup, memaparkan kesimpulan dari penelitian, dan saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Daftar pustaka yang menguraikan semua referensi yang digunakan dalam penelitian ini baik yang berupa buku, artikel, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini.

Lampiran yang berisi semua bukti-bukti tertulis yang terkait dengan penelitian ini.